

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HARIS KARIM, ST., MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABDUL HARIS KARIM, ST,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700422 199303 1 011

PERJANJIAN KINERJA 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	- Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66,32%
2	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah.	- Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	46,43%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 15.202.071.459,00	Sumber Dana APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 10.991.852.750,00	Sumber Dana APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 17.665.149.992,00	Sumber Dana APBD
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 75.870.222.273,00	Sumber Dana APBD
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 429.099.700,00	Sumber Dana APBD
6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 59.715.100,00	Sumber Dana APBD
7	Program Penatagunaan Tanah	Rp 36.040.000,00	Sumber Dana APBD

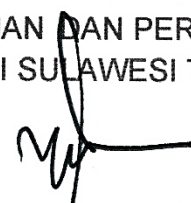
Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABDUL HARIS KARIM, ST.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700422 199303 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

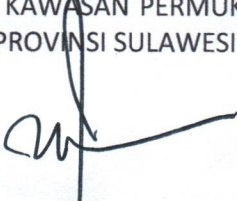
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERUMAHAN


Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST, M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19761104 200901 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG PERUMAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Program Pengembangan Perumahan			
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	90.24 %
2	meningkatkan fasilitas rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	0 %
Kegiatan			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya data rumah yang berada di lokasi rawan bencana dan berpotensi terkena relokasi akibat program provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
Sub Kegiatan			
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah diLokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
Kegiatan			
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya Data Rumah Tangga Penerima Bantuan dan Pembiayaan Ruman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1 Dokumen
Sub Kegiatan			
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		
	Tersedianya dokumen pelaksanaan koordinasi penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen
Kegiatan			
3	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	48 Unit
Sub Kegiatan			
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi		
	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	48 Unit
Kegiatan			
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya Laporan Serah Terima Bagi Korban Bencana dan Relokasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Sikronisasi Penyelenggaraan Perumahan		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp10.991.852.750,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp126.352.750,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp126.352.750,00	Sumber Dana APBD
2	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp24.420.000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp24.420.000,00	Sumber Dana APBD
3	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp10,805,950,000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Rp10,805,950,000	Sumber Dana APBD
4	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp35.130.000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Rp35.130.000,00	Sumber Dana APBD

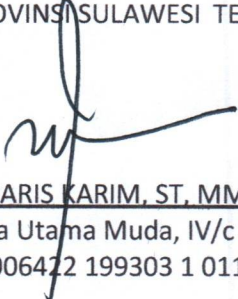
Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PERUMAHAN


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011


Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST, M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19761104 200901 1 004

**PERJANJIANKINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIANKINERJATAHUN2025

Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintahanyangefektif,transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRI IRIANTI, ST, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnyadisebut**PIHAKPERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

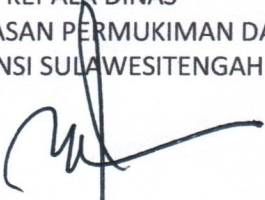
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN


FITRI IRIANTI, ST, MM
Pembina, IV/a
Nip. 19790824 200701 2 018

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANA
HAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Tersedianya Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persentase luas kawasan kumuh yang di tangani (10-15 Ha)	14.93%
Kegiatan			
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Tertatanya kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	154.02 Ha
Sub Kegiatan			
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman		
	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		
	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang Yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang
Kegiatan			
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	23 Ha
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan mugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	520 unit
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	5 ha
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	5 ha

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp17.665.149.992,00	Sumber Dana APBD
1	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp3.873.336.700,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp3.723.099.750,00	Sumber Dana APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp52.677.200,00	Sumber Dana APBD
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Rp97.559.750,00	Sumber Dana APBD
2	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp13.791.813.292,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp37.500.000,00	Sumber Dana APBD
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp8.062.207.240,00	Sumber Dana APBD
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp4.720.044.452,00	Sumber Dana APBD
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp972.061.600,00	Sumber Dana APBD

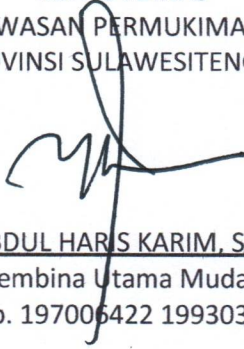
Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESITENGAH

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN


ABDUL HARS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011


FITRI IRIANTI, ST, MM
Pembina, IV/a
Nip. 19790824 200701 2 018

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, SKM, SH, MH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

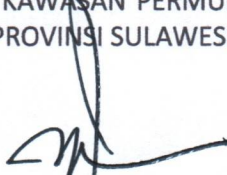
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

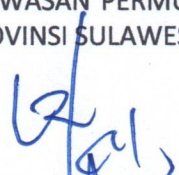
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IRWAN, SKM, SH, MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM DAN
SERTIFIKASI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	15.67 %
Kegiatan			
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
	Tersedianya PSU Permukiman	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1 Laporan
Sub Kegiatan			
1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	209 Dokumen
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana ,Sarana ,dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan
3	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman		
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	199 Lokasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp75.870.222.273,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Rp75.870.222.273,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp450.360.000,00	Sumber Dana APBD
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp75.254.562.273,00	Sumber Dana APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Rp165.300.000,00	Sumber Dana APBD

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABDUL HARI S KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

IRWAN, SKM, SH, MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. DJAMBAR, ST, MH**
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

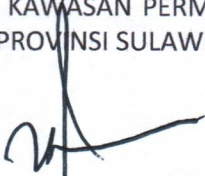
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

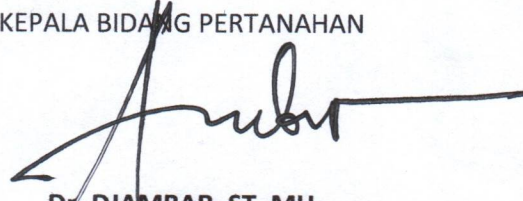
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN


Dr. DJAMBAR, ST, MH
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19740513 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG PERTANAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
1	Terselesainya sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	31.37 %
Kegiatan			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Terfasilitasi penyelesaian Kasus sengketa	Jumlah Fasilitasi penyelesaian Kasus sengketa	40%
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	Terpenuhinya Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Presentase Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	73,49%
Kegiatan			
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Tersedianya data Untuk Kebutuhan Redistribusi Tanah	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam Satu Daerah Provinsi	13 Kab/Kota
Sub Kegiatan			
	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	13 Berita Acara
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
3	Meningkatnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	73,49%
Kegiatan			
	Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Tersusunnya Dokumen Penatagunaan Tanah	Dokumen perencanaan tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	1 Dokumen
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp429.099.700,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp429.099.700,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp429.099.700,00	Sumber Dana APBD
2	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp59.715.100,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp59.715.100,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.245.100,00	Sumber Dana APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp42.470.000,00	Sumber Dana APBD
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp36.040.000,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp36.040.000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp36.040.000,00	Sumber Dana APBD

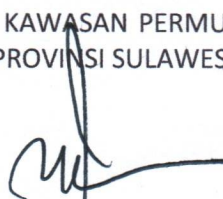
Palu, Oktober 2025

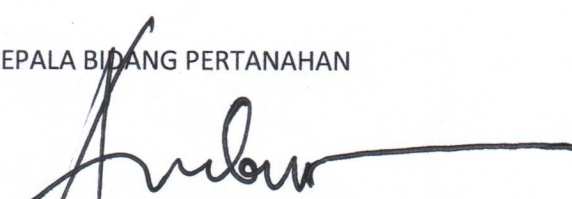
PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PERTANAHAN


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011


Dr. DJAMBAR, ST, MH
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19740513 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, SKM, SH, MH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

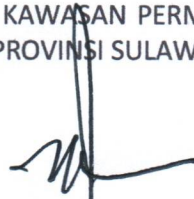
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

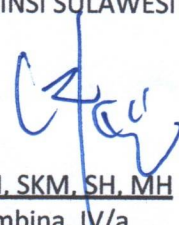
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


IRWAN, SKM, SH, MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT

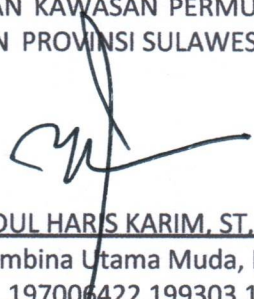
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	92%
Kegiatan			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat daerah	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp15.202.271.459,50	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp162.880.000,00	Sumber Dana APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.233.498.684,18	Sumber Dana APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp70.400.000,00	Sumber Dana APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp125.622.000,00	Sumber Dana APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp820.137.490,00	Sumber Dana APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp92.920.000,00	Sumber Dana APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp609.742.825,10	Sumber Dana APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.087.070.460,22	Sumber Dana APBD

Palu, Oktober 2025

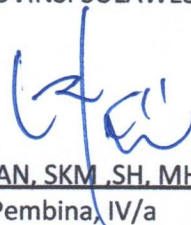
PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST. MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


IRWAN, SKM. SH. MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAZAR, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kegawaian dan Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRWAN, SKM, M.KES**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

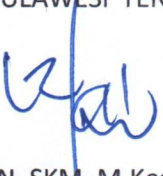
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IRWAN, SKM, M.Kes
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM**


NAZAR, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 1972617 199403 1 007

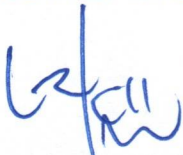
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Sub Kegiatan			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
6	Pengadaan Mebel		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp51.182.000,00	Sumber Dana APBD
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp74.440.000,00	Sumber Dana APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp191.604.140,00	Sumber Dana APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp65.324.850,00	Sumber Dana APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp563.208.500,00	Sumber Dana APBD
6	Pengadaan Mebel	Rp92.920.000,00	Sumber Dana APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp301.957.925,10	Sumber Dana APBD
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp106.600.000,00	Sumber Dana APBD
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp201.184.900,00	Sumber Dana APBD

Palu. Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

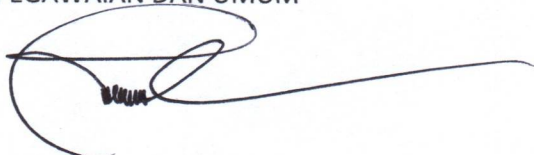


IRWAN, SKM, M.KES

Pembina, IV/a

Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM



NAZAR, S.Sos, M.Si

P Pembina, IV/a

Nip. 1972617 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANITA KRISTIANTI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRWAN, SKM, M.Kes**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

ANITA KRISTIANTI, S.Sos
Penata Tkt I
Nip. 19681228 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Sub Kegiatan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	52 Unit
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.728.658.684,18	Sumber Dana APBD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp3.504.840.000,00	Sumber Dana APBD
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp70.400.000,00	Sumber Dana APBD
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp824.710.460,22	Sumber Dana APBD
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp62.360.000,00	Sumber Dana APBD
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp200.000.000,00	Sumber Dana APBD

Palu. Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET



ANITA KRISTIANTI, S.Sos
Penata Tkt I
Nip. 19681228 198903 2 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKIFLI, ST, M.Eng**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRWAN, SKM, M.KES**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM

ZULKIFLI, ST, M.Eng

Pembina, IV/a

Nip. 19700615 200112 1 005

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IRWAN, SKM, M.KES

Pembina, IV/a

Nip. 19731103 200501 1 008

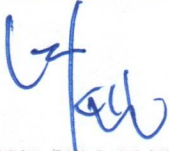
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
Sub Kegiatan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp162.880.000,00	Sumber Dana APBD

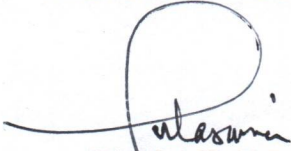
Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM



ZULKIFLI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
Nip. 19700615 200112 1 005